

## Kegagalan Pelembagaan Negara Muslim Inklusif: Studi Historis-Institusional atas Pemikiran Politik Muhammad Ali Jinnah di Pakistan

Fajrul Falah Al-Azhari <sup>1\*</sup>, Agus Santoso <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: [fajarkanzh@gmail.com](mailto:fajarkanzh@gmail.com) <sup>1</sup> [agus.santoso@uinsby.ac.id](mailto:agus.santoso@uinsby.ac.id) <sup>2</sup>

---

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 02-10-2025

Revised: 01-12-2025

Accepted: 31-12-2025

DOI: <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i2>

---

#### Kata Kunci

Muhammad Ali Jinnah  
Pakistan  
Negara Inklusif

---

### ABSTRAK

Artikel ini menganalisis kegagalan pelembagaan visi negara Muslim inklusif Muhammad Ali Jinnah dalam struktur politik Pakistan pada periode 1947–1977. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mekanisme institusional yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara visi normatif Jinnah dan praktik kenegaraan Pakistan awal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain analisis historis-institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi militer-birokrasi, sentralisasi kekuasaan, serta konflik pusat-daerah membentuk *path dependence* politik yang mendorong Pakistan menuju model negara yang semakin eksklusif dan otoritarian..

---

### ABSTRACT

---

#### Keywords

Muhammad Ali Jinnah  
Pakistan  
Inclusive State

*This article examines the failure to institutionalize Muhammad Ali Jinnah's vision of an inclusive Muslim state in Pakistan's political structure between 1947 and 1977. The study aims to explain the institutional mechanisms behind the divergence between Jinnah's normative vision and Pakistan's early state practices. Employing a qualitative historical-institutional approach, the findings reveal that military-bureaucratic dominance, political centralization, and center-region conflicts generated a path-dependent trajectory that shifted Pakistan toward an increasingly exclusive and authoritarian state model.*

---

### PENDAHULUAN

Pakistan merupakan salah satu negara Muslim terbesar di dunia yang memiliki sejarah politik yang kompleks, ditandai pergulatan panjang antara identitas Islam, kepentingan etnis, dan struktur kekuasaan negara (Qowiyyudin & Fauzi, 2023). Sejak kemerdekaannya pada 1947, Pakistan menjadi laboratorium penting bagi perdebatan mengenai apakah negara Muslim harus dibangun sebagai *Islamic state* berbasis syariat atau sebagai *modern Muslim state* yang menjadikan etika Islam sebagai fondasi moral dalam ruang publik tanpa menghilangkan prinsip demokrasi,

pluralisme, dan kesetaraan warga (Darmawan & Nazra, 2024a). Di tengah perdebatan intelektual dan politik ini, Muhammad Ali Jinnah menempati posisi fundamental sebagai arsitek utama berdirinya Pakistan sekaligus figur yang merumuskan visi awal negara tersebut. Pemikirannya mengenai negara inklusif yang menjamin kesetaraan bagi seluruh warga, termasuk minoritas agama dan kelompok etnis, menjadikan Jinnah sebagai tokoh kunci dalam diskursus modern tentang politik Islam dan negara-bangsa (Barella et al., 2023). Memahami ulang visi politik inklusif Jinnah menjadi penting bukan hanya bagi kajian sejarah Pakistan, tetapi juga bagi pembacaan kontemporer mengenai bentuk negara Muslim modern yang demokratis.

Secara historis, fondasi pemikiran Jinnah tentang negara inklusif paling jelas tercermin dalam pidatonya pada 11 Agustus 1947 di Majelis Konstituante, di mana ia menegaskan prinsip kebebasan beragama, kesetaraan warga negara, dan pemisahan urusan agama dengan administrasi negara (Jalal, 1994). Namun, perjalanan Pakistan sejak kemerdekaan menunjukkan ketegangan serius antara visi tersebut dan realitas politik yang berkembang. Periode 1947–1977 merupakan fase pembentukan institusi negara (*critical formation period*) yang menentukan arah jangka panjang politik Pakistan. Pada fase inilah muncul dominasi militer-birokrasi, ketegangan etnis antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur, serta konflik pusat-daerah yang berulang (Moore, 1969). Semua dinamika tersebut bukan hanya memengaruhi karakter negara baru ini, tetapi juga membuka jarak yang semakin besar antara visi politik inklusif Jinnah dan struktur politik yang terbentuk setelahnya (Jaffrelot, 2016). Pemahaman mendalam terhadap ketegangan historis ini diperlukan untuk melihat bagaimana ide-ide politik Jinnah mengalami distorsi, modifikasi, atau bahkan pengabaian ketika dihadapkan pada konfigurasi kekuasaan yang lebih kompleks.

Masalah empiris yang ingin diangkat dalam penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa Pakistan gagal menginstitutionalisasi visi negara inklusif yang digagas Jinnah. Alih-alih berkembang sebagai negara yang menjamin hak minoritas dan menempatkan kewarganegaraan sebagai basis utama identitas politik, Pakistan justru bergerak menuju model negara yang semakin eksklusif, terpusat, dan rentan

terhadap dominasi aktor non-demokratis (Jaffrelot, 2016). Peralihan ini memperlihatkan adanya jarak antara gagasan dan institusi, antara nilai inklusivitas yang ditawarkan Jinnah dan praktik kenegaraan yang sejak awal dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan elit, konflik komunal, serta campur tangan militer yang terus menguat. Oleh karena itu, memahami “kegagalan institusional” Jinnah bukan semata-mata persoalan sejarah politik yang bersifat naratif, tetapi merupakan fenomena ilmiah yang perlu dijelaskan secara sistematis melalui kerangka teori yang memungkinkan analisis hubungan antara ide, aktor, dan institusi negara.

Sejauh ini, sejumlah literatur telah membahas pemikiran Jinnah dalam berbagai sudut pandang. Studi-studi tentang Jinnah umumnya berfokus pada biografi politiknya (Barella et al., 2023), interpretasi terhadap pidato-pidatonya (Jamali et al., 2025), atau ide mengenai Two-Nation Theory (Rizwan et al., 2025). Kajian yang lain lebih menekankan pada hubungan sipil–militer dan dominasi militer dalam politik Pakistan, yang menjelaskan pola intervensi militer dan melemahnya institusi sipil sejak dekade awal kemerdekaan (Qaisar, 2025). Sementara itu, penelitian tentang Two-Nation Theory cenderung memusatkan perhatian pada perdebatan ideologis dan konsekuensi politiknya, bukan pada bagaimana teori tersebut dipraktikkan dalam bentuk institusi negara. Di sisi lain, kajian analisis wacana mengenai pidato 11 Agustus Jinnah memberikan gambaran penting mengenai sifat inklusif visinya, namun masih terbatas pada level teks dan tidak menjelaskan bagaimana wacana itu seharusnya diterjemahkan ke dalam struktur institusional. Dengan demikian, literatur yang ada masih memisahkan pembahasan antara ide politik Jinnah, dinamika kekuasaan pasca-kemerdekaan, dan transformasi institusi negara.

Dari pemetaan literatur tersebut, terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara eksplisit menggunakan kerangka *Historical Institutionalism* untuk menjelaskan ketidaksinambungan antara visi politik Jinnah dan praktik politik Pakistan selama 1947–1977. Pendekatan ini penting karena mampu menguraikan bagaimana suatu gagasan politik mengalami transformasi atau bahkan kegagalan ketika bertemu dengan kondisi struktural tertentu, meliputi *critical juncture*, *path dependence*, dan *institutional drift*. Mayoritas kajian sebelumnya masih bersifat

deskriptif, terfragmentasi, atau hanya menyoroati satu aspek tanpa melihat relasi antara ide dan pembentukan institusi negara. Penelitian ini menawarkan cara pandang baru dengan menjembatani kajian pemikiran politik Jinnah dan kajian institusional mengenai negara Pakistan awal melalui analisis historis-institusional yang komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana dan mengapa visi negara inklusif Muhammad Ali Jinnah gagal terinstitusionalisasi dalam struktur politik Pakistan pada periode 1947–1977? (2) Faktor institusional apa yang paling berperan dalam membentuk *path dependence* yang mengarah pada konfigurasi politik otoritarian dan eksklusif dalam periode tersebut?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis proses historis-institusional yang menghambat terwujudnya visi politik inklusif Jinnah dalam struktur negara Pakistan pada masa 1947–1977; dan (2) mengidentifikasi mekanisme institusional—meliputi peran militer, birokrasi, dan dinamika regional—yang menciptakan *path dependence* yang mendorong negara Pakistan bergerak ke arah yang berbeda dari visi awal Jinnah.

Penelitian ini memberikan kontribusi di tiga tingkatan. Secara teoretis, penelitian ini mengaplikasikan *Historical Institutionalism* untuk menganalisis persoalan dalam studi politik Islam, suatu pendekatan yang masih jarang digunakan dalam kajian Jinnah maupun Pakistan. Secara empiris, penelitian ini menawarkan pembacaan baru mengenai hubungan antara visi inklusif Jinnah dan proses pembentukan institusi negara pada fase awal kemerdekaan. Secara akademik, penelitian ini membantu mengisi kekosongan kajian Pakistan di Indonesia dengan memberikan analisis yang lebih terstruktur mengenai faktor-faktor institusional yang membentuk karakter negara Pakistan modern.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian historis-institusional (*historical institutional analysis*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji hipotesis kuantitatif, melainkan

menjelaskan proses historis dan mekanisme institusional yang menyebabkan kegagalan pelembagaan visi negara inklusif Muhammad Ali Jinnah dalam struktur politik Pakistan pada periode 1947–1977 (Hall & Taylor, 1996; Mahoney & Thelen, 2009; Thelen, 1999). Fokus utama penelitian adalah hubungan antara ide politik, aktor, dan pembentukan institusi negara dalam konteks sejarah awal Pakistan.

Kerangka analisis utama dalam penelitian ini adalah Historical Institutionalism (HI), yang menekankan pentingnya *critical juncture*, *path dependence*, serta mekanisme perubahan institusional seperti *institutional drift* dan *institutional conversion* (Thelen, 1999). Kerangka ini digunakan untuk menelusuri bagaimana keputusan dan konfigurasi kekuasaan pada fase awal kemerdekaan Pakistan membentuk arah institusional jangka panjang negara. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan mengapa visi normatif Jinnah yang inklusif tidak berhasil terinstitusionalisasi, meskipun pada fase awal terdapat peluang historis dan politik yang relatif terbuka.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang mencakup dokumen historis dan literatur akademik. Data primer historis meliputi pidato resmi Muhammad Ali Jinnah, terutama pidato 11 Agustus 1947, dokumen Majelis Konstituante Pakistan dan teks konstitusi Pakistan pada periode awal hingga Konstitusi 1973 sebagai rujukan historis dan institusional, sejauh relevan dengan fokus analisis penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku akademik, artikel jurnal internasional dan nasional, serta karya-karya mutakhir yang membahas pemikiran politik Jinnah, sejarah politik Pakistan, hubungan sipil - militer, dan dinamika institusional negara pascakemerdekaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menyeleksi sumber-sumber yang relevan, kredibel, dan memiliki otoritas akademik. Literatur dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitannya dengan tiga fokus utama penelitian, yaitu: (1) visi politik inklusif Jinnah, (2) pembentukan institusi negara Pakistan pada fase awal kemerdekaan, dan (3) dinamika kekuasaan militer–birokrasi serta konflik regional. Seluruh sumber dikaji secara kritis untuk menghindari pembacaan yang bersifat deskriptif atau apologetik terhadap tokoh dan periode yang diteliti.

Analisis data dilakukan melalui analisis historis-kualitatif dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, peneliti memetakan visi normatif Jinnah mengenai negara inklusif berdasarkan pidato dan dokumen awal negara. Kedua, peneliti menelusuri perubahan konfigurasi kekuasaan pasca-wafatnya Jinnah dan mengidentifikasi aktor-aktor institusional utama yang memengaruhi arah politik negara. Ketiga, data dianalisis menggunakan konsep *critical juncture*, *path dependence*, *institutional drift*, dan *institutional conversion* untuk menjelaskan mekanisme kegagalan institusional secara sistematis (Pierson, 2000). Analisis ini dilakukan secara kronologis dan tematik agar hubungan sebab-akibat antarperistiwa historis dapat dijelaskan secara utuh.

Untuk menjaga validitas analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yakni membandingkan berbagai jenis literatur dan dokumen historis dari perspektif yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghindari bias interpretatif dan memperkuat argumentasi mengenai keterkaitan antara visi politik Jinnah dan praktik institusional negara Pakistan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Visi Negara Inklusif Jinnah dan Peluang Institusional pada Fase Awal Kemerdekaan (1947–1948)**

Visi politik Muhammad Ali Jinnah tentang Pakistan sejak awal kemerdekaan berangkat dari gagasan bahwa negara harus menjamin kesetaraan kewarganegaraan bagi seluruh penduduk tanpa memandang agama. Bagi Jinnah, identitas Muslim bukanlah dasar pembentukan negara teokratis, tetapi alat politik untuk mengamankan hak-hak komunitas Muslim yang terpinggirkan dalam struktur kolonial India (Nugroho, 2019). Setelah Pakistan berdiri, orientasi politiknya bergeser dari perjuangan identitas menuju pembangunan negara modern yang bertumpu pada prinsip keadilan, perlindungan warga lemah, dan jaminan kebebasan beragama (Darmawan & Nazra, 2024b). Dengan demikian, Islam dalam perspektif Jinnah lebih bersifat etis dan moral, bukan instrumen hukum positif yang mengatur administrasi negara.

Blueprint paling eksplisit dari visi tersebut tercermin dalam pidatonya pada 11 Agustus 1947 di Majelis Konstituante. Dalam pidato itu, Jinnah menegaskan bahwa agama bukan urusan negara, dan semua warga negara (Muslim, Hindu, Sikh, Kristen) harus diperlakukan setara oleh negara. Ia juga menolak pemisahan warga berdasarkan identitas keagamaan dalam fungsi publik (Anwar et al., 2020). Pernyataan ini menjadi fondasi normatif bagi konsep negara inklusif yang ingin ia bangun, dan hingga kini, pidato tersebut dianggap sebagai dokumen penting dalam memahami orientasi ideologis awal Pakistan. Pada tahap ini, arah negara yang dibayangkan Jinnah sangat jelas: negara dengan identitas moral Islam tetapi menyelenggarakan pemerintahan yang sekuler dalam fungsi administratifnya.

Pada fase awal kemerdekaan, struktur politik Pakistan sebenarnya menyediakan peluang institusional yang besar untuk menerjemahkan visi Jinnah ke dalam bangunan negara. Tahun pertama kemerdekaan merupakan periode yang sangat cair, ketika lembaga-lembaga negara belum tersentralisasi dan belum ada aktor dominan yang mampu memaksakan agenda politiknya secara unilateral. Dalam perspektif *Historical Institutionalism*, periode seperti ini disebut *critical juncture*, yaitu momen ketika pilihan politik yang diambil oleh para pemimpin dapat menentukan jalur perkembangan institusional jangka panjang (Thelen, 1999). Jinnah, sebagai pemimpin dengan legitimasi moral dan politik paling kuat, memiliki ruang besar untuk mempengaruhi arah pembentukan sistem politik Pakistan.

Selain itu, kekuatan sipil relatif lebih menonjol dibandingkan militer pada tahun-tahun awal (Shafqat, 2019). Militer Pakistan saat itu belum terorganisasi sebagai kekuatan politik yang otonom; struktur komandonya masih bergantung pada warisan kolonial dan belum memiliki legitimasi untuk memainkan peran politik. Birokrasi kolonial yang diturunkan ke Pakistan juga belum cukup kuat untuk menciptakan hegemoni administratif. Kondisi ini menciptakan peluang bagi para pemimpin sipil untuk merumuskan bentuk negara sesuai visi Jinnah, negara parlementer yang menempatkan supremasi sipil sebagai prinsip dasar. Majelis Konstituante memiliki ruang deliberatif yang cukup untuk menerjemahkan gagasan-gagasan tersebut ke dalam rancangan konstitusi.

Pada sisi lain, komposisi elite politik pada periode 1947–1948 juga relatif kondusif. Para pemimpin Liga Muslim, meskipun memiliki perbedaan pandangan, masih berada dalam orbit pengaruh Jinnah. Tidak ada pemimpin tunggal lain yang memiliki kapasitas politik atau kharisma untuk menandingi posisinya (Jalal, 1994). Kondisi ini memungkinkan terciptanya konsensus awal mengenai negara yang inklusif dan non-diskriminatif. Dengan legitimasi simbolik sebagai Bapak Bangsa, Jinnah memiliki posisi strategis untuk mengarahkan pembangunan politik Pakistan ke jalur yang sejalan dengan prinsip-prinsip inklusif tersebut. Dukungan publik terhadap Jinnah yang sangat besar pada masa ini juga memperkuat peluang pelembagaan visi politiknya ke dalam struktur formal negara (Shabbir et al., 2024).

Namun, peluang historis tersebut tidak berlangsung lama. Kesehatan Jinnah yang kian memburuk membuatnya tidak memiliki waktu untuk memastikan bahwa visi politiknya benar-benar terinstitusionalisasi (Wolpert, 1984). Selain itu, krisis kemanusiaan akibat migrasi besar-besaran dari India, konflik administratif dengan India mengenai Kashmir, serta keterbatasan kapasitas negara baru menyita perhatian elite, sehingga pembentukan institusi demokratis yang stabil tertunda (Ayunda & Aria, 2017). Krisis-krisis awal ini mempercepat kebutuhan negara untuk membangun struktur kekuasaan yang mampu mengelola instabilitas, dan kondisi ini kemudian menjadi pintu masuk bagi lahirnya struktur politik yang berbeda dari blueprint Jinnah (Jaffrelot, 2016).

Dengan demikian, kegagalan Pakistan untuk berkembang sebagai negara inklusif tidak dapat dijelaskan dengan meragukan kejelasan visi Jinnah. Baik secara normatif maupun politis, visi tersebut memiliki landasan moral, dukungan elite, dan peluang institusional pada fase awal kemerdekaan. Permasalahan utamanya terletak pada proses historis yang terjadi setelahnya, ketika konfigurasi kekuasaan, fragmentasi elite sipil, dan menguatnya militer-birokrasi membawa Pakistan keluar dari jalur yang dibayangkan Jinnah (Niaz, 2025). Oleh karena itu, untuk memahami kegagalan institusional Pakistan, analisis harus berpindah dari ranah gagasan ke ranah kekuasaan dan proses institusional yang berkembang pasca-1948.

## **2. Kegagalan Institusional Pasca-Jinnah: Dominasi Militer-Birokrasi dan Hilangnya Arah Politik (1948-1958)**

Wafatnya Muhammad Ali Jinnah pada September 1948 menjadi titik balik dalam sejarah politik Pakistan yang sangat menentukan arah institusional negara. Sebagai figur sentral pendiri negara, Jinnah tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai simbol pemersatu dan penentu arah ideologi awal Pakistan (Mahsyar & Hasaruddin, 2022). Ketidakhadirannya meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang tidak dapat diisi oleh tokoh mana pun dalam Liga Muslim. Elite-elite sipil yang tersisa tidak memiliki legitimasi, otoritas moral, maupun visi politik yang sama kuatnya. Ketiadaan figur pengarah ini membuat proyek negara inklusif yang sebelumnya memiliki arah ideologis yang jelas menjadi kehilangan fondasi strategis untuk dilanjutkan secara konsisten.

Setelah Jinnah wafat, fragmentasi elite sipil semakin memperburuk situasi (Shafiq et al., 2025). Liga Muslim, yang menjadi tulang punggung politik Pakistan, berubah menjadi arena pertarungan antar-kelompok yang memperebutkan posisi, sumber daya, dan legitimasi. Fragmentasi ini menunjukkan bahwa partai tersebut tidak dibangun sebagai institusi politik yang kuat, melainkan sebagai kendaraan perjuangan kemerdekaan yang tidak memiliki struktur internal yang stabil. Lemahnya basis organisasi dan kepemimpinan yang terpecah-pecah menyebabkan elite sipil tidak mampu memainkan peran sebagai pengendali proses politik. Kekosongan ini kemudian diisi oleh birokrasi kolonial yang mewarisi struktur administratif Pakistan. Para birokrat sipil yang memiliki pengalaman panjang dalam tata kelola kolonial menemukan peluang untuk mengambil posisi dominan dalam pemerintahan, terutama karena mereka menawarkan stabilitas administratif di tengah kekacauan politik (Sayeed, 1958).

Dalam konteks inilah militer mulai tumbuh menjadi aktor politik yang semakin penting. Pada periode awal, militer Pakistan masih dalam proses konsolidasi organisasi, tetapi instabilitas sipil dan ketiadaan elite politik yang mampu mengelola negara memberikan ruang bagi militer untuk memperluas perannya (Staniland et al., 2020). Konflik dengan India mengenai Kashmir, gelombang migrasi besar, dan ketegangan keamanan di wilayah perbatasan

memperkuat argumen bahwa negara membutuhkan institusi yang mampu memberikan stabilitas cepat, peran yang kemudian diambil alih oleh militer dan aparat birokrasi. Dengan demikian, dominasi militer bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan respons terhadap kegagalan elite sipil untuk membangun struktur politik yang stabil pasca-Jinnah.

Pada saat yang sama, pemerintah mulai mengadopsi kebijakan-kebijakan sentralistik yang bertujuan mengendalikan situasi politik yang kacau (Jaffrelet, 2016). Sentralisasi kekuasaan ini, meskipun dimaksudkan untuk efisiensi administratif, secara bertahap menciptakan pola *path dependence* yang mengarah pada struktur negara yang semakin eksklusif dan tidak responsif terhadap pluralitas wilayah maupun kelompok etnis di Pakistan. Kebijakan sentralistik seperti penunjukan gubernur yang kuat, pengabaian aspirasi politik Pakistan Timur, dan pembatasan ruang representasi politik di tingkat provinsi menjadi faktor penting yang menjauhkan negara dari visi inklusif Jinnah. Struktur yang mengutamakan stabilitas di bawah kontrol pusat kemudian memunculkan pola kekuasaan yang memberi ruang lebih besar bagi birokrasi dan militer untuk mengontrol negara.

Akibatnya, tidak terbentuk institusi yang dapat menjamin representasi politik secara setara bagi kelompok minoritas agama, etnis, maupun wilayah. Pakistan Timur, yang secara demografis lebih besar dibanding Pakistan Barat, sering kali merasa dipinggirkan dalam kebijakan pusat (Maron, 1955). Wilayah-wilayah seperti Balochistan, Sindh, dan NWFP juga tidak memperoleh ruang representasi yang proporsional dalam struktur negara. Ketidakseimbangan representasi ini memperburuk polarisasi politik dan menciptakan ketegangan regional yang semakin mengikis kemungkinan bagi Pakistan untuk mengadopsi struktur negara inklusif sebagaimana dikehendaki Jinnah. Dalam kondisi seperti ini, visi Jinnah tentang kesetaraan warga negara kehilangan fondasi institusional yang diperlukan untuk bertahan.

Dengan demikian, periode 1948–1958 merupakan fase ketika jalur pembangunan negara Pakistan mulai menyimpang dari blueprint politik yang dirumuskan Jinnah. Ketiadaan kepemimpinan pengganti yang kuat, fragmentasi elite sipil, penguatan bertahap militer dan birokrasi, serta kebijakan sentralistik

yang mengabaikan pluralitas wilayah dan kelompok sosial menciptakan konfigurasi kekuasaan yang berbeda dari visi awal negara inklusif. Perubahan inilah yang menjadi dasar bagi pembentukan *path dependence* yang pada dekade berikutnya mendorong Pakistan semakin menjauh dari prinsip-prinsip kesetaraan dan supremasi sipil yang pernah dibayangkan Jinnah.

### **3. Konsolidasi *Path Dependence*: Sentralisasi, Konflik Regional, dan Pergeseran Identitas Negara (1958–1977)**

Kudeta militer yang dipimpin Ayub Khan pada tahun 1958 menandai konsolidasi formal dari jalur institusional yang telah terbentuk sejak wafatnya Jinnah (Tudor, 2015). Jika pada periode sebelumnya dominasi militer–birokrasi masih bersifat gradual dan informal, maka kudeta ini mengubahnya menjadi struktur kekuasaan yang dilembagakan secara konstitusional dan administratif. Militer tidak lagi berperan sebagai aktor pendukung stabilitas, tetapi tampil sebagai pengendali utama negara. Perubahan ini memperkuat *path dependence* politik Pakistan, di mana kekuasaan terpusat dan supremasi sipil semakin terpinggirkan (Cheema et al., 2009). Pada titik ini, peluang untuk kembali pada visi negara inklusif Jinnah semakin menyempit karena institusi negara telah diarahkan untuk mempertahankan stabilitas melalui kontrol, bukan melalui representasi dan deliberasi politik.

Di bawah pemerintahan Ayub Khan, negara Pakistan mengalami proses sentralisasi yang semakin intensif. Sistem *Basic Democracies* yang diperkenalkan tidak memperluas partisipasi politik secara substantif, tetapi justru menguatkan kontrol pusat terhadap masyarakat dan daerah (Tehseen, 2021). Militer dan birokrasi menjadi pilar utama pemerintahan, sementara partai politik dan parlemen kehilangan peran strategisnya. Pola ini menunjukkan mekanisme *institutional conversion*, di mana institusi formal seperti parlemen dan pemilu tetap dipertahankan secara simbolik, tetapi fungsinya diubah untuk menopang kekuasaan otoritarian. Akibatnya, institusi-institusi yang seharusnya menjadi sarana pelembagaan nilai inklusivitas justru berfungsi sebagai alat kontrol politik.

Konsekuensi paling nyata dari sentralisasi kekuasaan ini tampak dalam hubungan pusat–daerah, terutama dalam marginalisasi Pakistan Timur. Meskipun Pakistan Timur memiliki jumlah penduduk lebih besar, wilayah ini secara konsisten dikecualikan dari pengambilan keputusan politik dan distribusi sumber daya negara (Jaffrelot, 2016). Ketimpangan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politik dan simbolik, termasuk penyingkiran bahasa dan identitas budaya Pakistan Timur dari narasi nasional (Rahman, 1998). Ketegangan yang terus meningkat antara pusat dan Pakistan Timur mencerminkan kegagalan negara dalam mengelola pluralitas wilayah secara inklusif. Pada akhirnya, konflik ini mencapai puncaknya dengan pemisahan Bangladesh pada tahun 1971, yang menjadi bukti paling dramatis dari kegagalan institusional negara Pakistan dalam menjamin kesetaraan kewarganegaraan.

Pasca-1971, alih-alih melakukan refleksi mendalam terhadap kegagalan inklusivitas, negara Pakistan justru bergerak ke arah redefinisi identitas yang semakin eksklusif. Konstitusi 1973 memang mengembalikan bentuk pemerintahan sipil, tetapi pada saat yang sama memperkuat definisi Islam sebagai identitas formal negara (Abdulmuminov, 2015). Pergeseran ini menandai transformasi penting dalam arah politik Pakistan: dari visi Jinnah yang menempatkan agama sebagai sumber etika publik menuju negara yang secara konstitusional mendefinisikan identitas warganya berdasarkan agama. Perubahan ini mempersempit ruang kewarganegaraan bagi kelompok minoritas dan memperkuat hierarki identitas dalam struktur negara. Dengan demikian, eksklusivitas menjadi bagian dari desain institusional, bukan sekadar penyimpangan praktik.

Dalam perspektif *Historical Institutionalism*, fase 1958–1977 memperlihatkan dua mekanisme utama yang mengunci arah negara: *institutional drift* dan *institutional conversion* (Fioretos, 2023). *Drift* terjadi ketika institusi yang diwarisi dari fase awal tidak diperbarui untuk menyesuaikan dengan tuntutan pluralitas sosial, sehingga nilai inklusivitas secara perlahan terkikis. Sementara itu, *conversion* terjadi ketika institusi-institusi formal digunakan untuk tujuan yang berbeda dari maksud awalnya, yakni menopang kekuasaan sentralistik dan eksklusif. Kedua mekanisme ini bekerja secara simultan, menciptakan struktur kekuasaan yang sulit

diubah dan menjauhkan Pakistan secara permanen dari blueprint negara inklusif Jinnah.

Dengan demikian, tiga dekade pertama sejarah Pakistan menunjukkan bahwa kegagalan mewujudkan visi negara inklusif Jinnah bukan merupakan hasil dari satu keputusan tunggal, melainkan akumulasi proses institusional yang saling menguatkan. Kudeta militer, sentralisasi kekuasaan, konflik regional, serta redefinisi identitas negara membentuk pola *path dependence* yang menutup kemungkinan kembalinya Pakistan ke jalur awal yang dibayangkan pendirinya. Pada tahap ini, visi Jinnah tidak hanya terpinggirkan, tetapi secara struktural digantikan oleh model negara yang menekankan stabilitas, kontrol, dan eksklusivitas sebagai prinsip utama tata kelola politik.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan pelembagaan visi negara Muslim inklusif Muhammad Ali Jinnah di Pakistan pada periode 1947–1977 bukan disebabkan oleh ketidakjelasan atau kelemahan gagasan normatif Jinnah, melainkan oleh proses historis-institusional yang berkembang pasca-kemerdekaan. Pada fase awal, visi inklusif Jinnah memiliki legitimasi moral, dukungan elite, serta peluang institusional yang cukup besar untuk diterjemahkan ke dalam struktur negara. Namun, peluang tersebut tidak berlanjut akibat keterbatasan waktu kepemimpinan Jinnah, fragmentasi elite sipil, serta krisis politik dan keamanan yang menyertai kelahiran negara Pakistan.

Melalui kerangka Historical Institutionalism, penelitian ini menemukan bahwa wafatnya Jinnah merupakan *critical juncture* yang mengubah arah pembangunan institusi negara. Kekosongan kepemimpinan sipil yang kuat membuka ruang bagi dominasi militer–birokrasi, sentralisasi kekuasaan, dan melemahnya institusi representatif. Proses ini membentuk *path dependence* yang secara bertahap mengunci Pakistan dalam jalur politik yang semakin otoritarian dan eksklusif, menjauh dari prinsip kesetaraan kewarganegaraan yang menjadi inti visi Jinnah.

Pada periode 1958–1977, arah institusional tersebut semakin mengeras melalui dua mekanisme utama, yakni *institutional drift* dan *institutional conversion*.

Nilai-nilai inklusivitas tidak diperbarui untuk merespons pluralitas sosial dan regional, sementara institusi formal negara—seperti konstitusi, parlemen, dan pemilu—dipertahankan tetapi difungsikan untuk menopang kekuasaan sentralistik. Akibatnya, konflik pusat-daerah, marginalisasi wilayah, dan redefinisi identitas negara berbasis eksklusivitas agama menjadi bagian dari desain institusional negara, bukan sekadar penyimpangan praktik.

Dengan demikian, kegagalan negara Pakistan untuk berkembang sebagai negara Muslim inklusif merupakan hasil akumulasi proses institusional jangka panjang, bukan kesalahan individual Jinnah atau penyimpangan sesaat. Temuan ini menegaskan pentingnya membedakan antara visi normatif pendiri negara dan dinamika kekuasaan yang membentuk institusi pascakemerdekaan. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan relevansi Historical Institutionalism dalam kajian politik Islam dan negara Muslim modern, khususnya dalam menjelaskan bagaimana gagasan politik progresif dapat mengalami kegagalan ketika berhadapan dengan konfigurasi institusional yang tidak mendukung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdumuminov, A. (2015). Pakistan's Partition: Search for National Identity. *Journal of Undergraduate Research at Minnesota State University, Mankato*, 15(1), 1.
- Anwar, M. N., Ullah, R., Ahmad, N., & Ali, M. (2020). Critical discourse analysis of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's (11th August, 1947) speech in the first constituent assembly of Pakistan. *South Asian Studies*, 30(1).
- Ayunda, M. K., & Aria, R. (2017). Konflik India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir beserta dampaknya (1947-1970). *Risalah*, 4(6), 911-925.
- Barella, Y., Kholifatun, U. N., Hasaruddin, H., & Syukur, S. (2023). Menelusuri Sejarah Islam Di Pakistan: Eksplorasi Ide Pembaharuan Muhammad Ali Jinnah. *Intizar*, 29(2).
- Cheema, A., Mohmand, S. K., & Patnam, M. (2009). Colonial proprietary elites and institutions: The persistence of de facto political dominance. *Available at SSRN 1473910*.
- Darmawan, B., & Nazra, E. R. C. (2024a). Lahirnya Pakistan: Perjuangan Muslim India Dan Tantangan Pembangunan Bangsa. *Hadharah: Jurnal Keislaman Dan Peradaban*, 18(2), 242-259.

- Darmawan, B., & Nazra, E. R. C. (2024b). LAHIRNYA PAKISTAN: Perjuangan Muslim India Dan Tantangan Pembangunan Bangsa. *Hadharah: Jurnal Keislaman Dan Peradaban*, 18(2), 242–259.
- Fioretos, O. (2023). Critical Junctures and Historical Legacies: Insights and Methods for Comparative Social Sciences. Edited by David Collier and Gerardo L. Munck. Lanham: Rowman & Littlefield, 2022. 520p. 39.95 paper. *Perspectives on Politics*, 21(3), 1110–1112.
- Hall, P. A., & Taylor, R. C. (1996). Political science and the three new institutionalisms. *Political Studies*, 44(5), 936–957.
- Jaffrelot, C. (2016). *The Pakistan paradox: Instability and resilience*. Random House India.
- Jalal, A. (1994). *The sole spokesman: Jinnah, the Muslim League and the demand for Pakistan* (Issue 31). Cambridge University Press.
- Jamali, A. S., Charan, F., & Tunio, S. H. (2025). Critical Discourse Analysis of Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah's first speech in the Constituent Assembly of Pakistan on 11 August 1947. *ASSAJ*, 4(02), 20–30.
- Mahoney, J., & Thelen, K. (2009). *Explaining institutional change: Ambiguity, agency, and power*. Cambridge University Press.
- Mahsyar, A. D. H. & Hasaruddin. (2022). KEMUNCULAN ISLAM DI PAKISTAN DAN PEMIKIRAN POLITIK MUHAMMAD ALI JINNAH. *SHOUTIKA*, 2(2), 31–43. <https://doi.org/10.46870/jkpi.v2i2.333>
- Maron, S. (1955). The Problem of East Pakistan. *Pacific Affairs*, 28(2), 132–144.
- Moore, R. A. (1969). The use of the army in nation-building: The case of Pakistan. *Asian Survey*, 9(6), 447–456.
- Niaz, I. (2025). OFFICER CLASS: PAKISTAN'S BUREAUCRATIC ELITES & THE ORIGINS OF CONSTITUTIONAL DISORDER. *Asian Affairs*, 56(1), 15–34.
- Nugroho, I. S. (2019). Pembentukan Negara Islam Pakistan: Tinjauan Historis Peran Ali Jinnah. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15(2), 201–218.
- Pierson, P. (2000). Increasing returns, path dependence, and the study of politics. *American Political Science Review*, 94(2), 251–267.
- Qaisar, M. S. (2025). Civil-Military Relations of Pakistan from 1947 To 2022. *ASSAJ*, 4(02), 1772–1784.
- Qowiyyudin, A. A., & Fauzi, M. A. (2023). Sejarah Islam dan Politik di Pakistan. *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam*, 2(2), 137–149.
- Rahman, T. (1998). Language and ethnicity in Pakistan. In *Text in Education and Society* (pp. 238–245). World Scientific.
- Rizwan, M., Hassan, S., & Nawaz, S. (2025). Jinnah Preparing His Nation for Future: Critical Discourse Analysis of Jinnah's Speech, 30th October, 1947. *ASSAJ*, 3(02), 1459–1469.

Sayeed, K. B. (1958). The political role of Pakistan's civil service. *Pacific Affairs*, 31(2), 131-146.

Shabbir, G., Ali, S., & Jawad, K. (2024). Charismatic Leadership in South Asian Political History: A Comparative Analysis of Jinnah and Gandhi. *Journal of Development and Social Sciences*, 5(2), 353-361.

Shafiq, M., Ahmad, M. H., & Ilyas, M. (2025). A Historical Analysis of Political Polarization and Instability in Pakistan (1947-2022). *Regional Lens*, 4(1), 202-214.

Shafqat, S. (2019). *Civil-Military Relations in Pakistan: From Zulfikar Ali Bhutto to Benazir Bhutto*. Routledge.

Staniland, P., Naseemullah, A., & Butt, A. (2020). Pakistan's military elite. *Journal of Strategic Studies*, 43(1), 74-103.

Tehseen, S. (2021). The role of local government system in South Asia: A case study of Pakistan. *Pakistan Journal of International Affairs* 4 (1), 740-753.

Thelen, K. (1999). Historical institutionalism in comparative politics. *Annual Review of Political Science*, 2(1), 369-404.

Tudor, M. (2015). Pakistan's Security State of Mind. *Perspectives on Politics*, 13(4), 1097-1102.

Wolpert, S. (1984). *Jinnah of Pakistan* (Vol. 144). Oxford University Press New York.